

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN GARUT

2024

<https://garutkab.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN GARUT**

BPS - STATISTICS OF GARUT REGENCY



INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN GARUT

2024

<https://garutkab.bps.go.id>

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Garut 2024

Nomor Publikasi : 32050.2453
Katalog BPS : 4102004.3205
ISSN : 2830-1323
Ukuran Buku : 17,6 x 25 cm
Jumlah Halaman : xviii + 59 halaman

NASKAH :

Tim Neraca Wilayah dan Analisis Statistik, BPS Kabupaten Garut

PENYUNTING :

Tim Neraca Wilayah dan Analisis Statistik, BPS Kabupaten Garut

GAMBAR KULIT :

Tim IPDS, BPS Kabupaten Garut

DITERBITKAN OLEH:

BPS Kabupaten Garut

Dilarang Mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik (UU No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 43 huruf b)

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN GARUT 2024

Pengarah : Nevi Hendri, S.Si,M.M
Editor : Yudi Surya Lesmana, S.Si
Penulis : Aceng Sudyana, SM
Pengolah Data/
Penyiapan Draft : Hendra Sukatriyana, SE

<https://garutkab.bps.go.id>

<https://parutkab.bps.go.id>

Halaman ini sengaja dikosongkan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan kehadiran Allah SWT, karena atas perkenan-Nyalah publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Garut Tahun 2024 ini bisa diterbitkan.

Publikasi ini berisi indikator-indikator kesejahteraan rakyat di Kabupaten Garut yang mencakup bidang Kependudukan, Kesehatan, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Taraf dan Pola Konsumsi, Perumahan, dan Sosial.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan publikasi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kami mengharap kritik dan saran yang konstruktif untuk kesempurnaan publikasi ini di masa yang akan datang.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu hingga publikasi ini dapat diselesaikan. Semoga publikasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Garut, Oktober 2024
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Garut,



Nevi Hendri, S.Si, M.M

<https://parutkab.bps.go.id>

Halaman ini sengaja dikosongkan

DAFTAR ISI

1	PENDAHULUAN	1
2	KEPENDUDUKAN	9
3	KESEHATAN.....	19
4	PENDIDIKAN.....	27
5	KETENAGAKERJAAN.....	37
6	TARAF DAN POLA KONSUMSI.....	41
7	PERUMAHAN	43
8	SOSIAL LAINNYA	47

<https://parutkab.bps.go.id>

Halaman ini sengaja dikosongkan

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2. 1 Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Garut, 2021-2023	10
Tabel 2. 2 Komposisi Penduduk (%) dan Angka Beban Ketergantungan di Kabupaten Garut, 2015-2023	14
Tabel 2. 3 Persentase Perbandingan perempuan berumur 15-49 tahun menurut karakteristik dan status penggunaan alat/cara KB Tahun 2022-2023	16
Tabel 3. 1 Persentase Anak Umur 0-59 Bulan (Balita) yang Pernah Diimunisasi Menurut Jenis Imunisasi di Kabupaten Garut, Keadaan Tahun 2022 dan Tahun 2023	24
Tabel 5. 1 Penduduk Usia Kerja menurut Angkatan Kerja, TPAK, dan TPT ...	39
Tabel 6. 1 Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita sebulan Menurut Kelompok Komoditas dan Kelompok Pengeluaran di Kabupaten Garut,	42
Tabel 7. 1 Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan di Kabupaten Garut Tahun 2023	45
Tabel 8. 1 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun Ke Atas yang Mempunyai Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Garut Keadaan Tahun 2023	49

<https://parutkab.bps.go.id>

Halaman ini sengaja dikosongkan

Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://garukab.bps.go.id>

ISTILAH TEKNIS

Air Minum Bersih	Air yang bersumber dari ledeng, air kemasan, serta pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung yang jarak ke tempat pembuangan limbah (septic tank) > 10 meter.
Angka Beban Tanggungan	Angka yang menyatakan perbandingan antara penduduk usia tidak produktif (di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan penduduk usia produktif (antara 15 sampai 64 tahun) dikalikan 100.
Angka Harapan Hidup	Perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur.
Angka Kesakitan	Persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan hingga mengganggu aktivitas sehari-hari.
Indeks Gini	Ukuran pemerataan pendapatan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan. Nilai Koefisien Gini terletak antara nol yang mencerminkan pemerataan sempurna dan satu yang menggambarkan ketidakmerataan sempurna.
Kepadatan Penduduk	Rata-rata banyaknya penduduk per kilometer persegi.
Lapangan Usaha	Bidang kegiatan dari pekerjaan/tempat bekerja dimana seseorang bekerja. Kegiatan ini mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dalam satu digit.
Pekerja Tidak Dibayar	seseorang yang bekerja membantu usaha untuk memperoleh penghasilan/keuntungan yang dilakukan oleh salah seorang anggota rumah tangga atau bukan anggota rumah tanggatanpa mendapat gaji

Perjalanan	Melakukan perjalanan pergi pulang (PP) sejauh minimal 100 Kilometer dan tidak dalam rangka mencari nafkah dan tidak dilakukan secara rutin
Perkotaan	Karakteristik sosial ekonomi dari wilayah administratif terkecil. Wilayah ini dikatakan sebagai perkotaan jika memenuhi persyaratan tertentu dalam hal kepadatan penduduk, lapangan kegiatan ekonomi utama, fasilitas-fasilitas perkotaan (jalan raya, sarana pendidikan formal, sarana kesehatan umum, dan sebagainya). Secara operasional penentuan daerah perkotaan dibuat dengan sistim skoring tertentu. Prosedur penentuan daerah perkotaan berlaku sejak tahun 1980 dan masih berlaku hingga saat ini.
Peserta Keluarga Berencana (Akseptor)	Orang yang mempraktekkan salah satu metode kontrasepsi.
Rasio Jenis Kelamin	Perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di satu daerah pada waktu tertentu.
Rata-Rata Lama Sekolah	Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.
Tamat Sekolah	Menyelesaikan pelajaran pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang sekolah di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkkan tanda tamat ijazah. Orang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi tetapi telah mengikuti ujian dan lulus dianggap tamat sekolah.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persentase pengangguran terhadap angkatan kerja
Tingkat Pertumbuhan Penduduk	Angka yang menunjukkan tingkat pertumbuhan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase.

<https://garutkab.bps.go.id>

<https://parutkab.bps.go.id>

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB I PENDAHULUAN

Pada era Tujuan Pembangunan Berkelanjutan , Revolusi Data, Big Data dan Nawacita seperti sekarang ini, informasi tentang capaian pembangunan merupakan sumber data utama bagi para pemangku kebijakan dalam merencanakan pembangunan nasional.

Peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat adalah tujuan utama pembangunan suatu daerah yang berkesinambungan. Tujuan tersebut dapat tercapai secara maksimal jika didukung dengan landasan yang kuat. Dukungan informasi dan data yang menggambarkan hal-hal yang benar tentang fenomena yang sedang terjadi serta disajikan tepat pada waktunya sangat penting, agar pembangunan yang dilaksanakan dapat terarah dan tepat sasaran

Salah satu informasi yang diperlukan dan terkait dengan pembangunan masyarakat adalah data statistik yang menggambarkan tentang kondisi kesejahteraan masyarakat. Ketersediaan data statistik yang menggambarkan kondisi kesejahteraan masyarakat di suatu daerah sangat diperlukan untuk mengarahkan perencanaan pembangunan, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, tepat guna, dan tepat sasaran. Indikator sosial atau Indikator Kesejahteraan Rakyat (Inkesra) di Kabupaten Garut, secara khusus menyajikan kumpulan data statistik yang diharapkan mampu memberikan gambaran sampai sejauh mana perkembangan kesejahteraan penduduk yang telah dicapai, sebagai hasil dari pembangunan yang telah dilaksanakan. Isi Inkesra ini masih bersifat makro mengingat sangat luasnya dimensi cakupan kesejahteraan. Namun demikian, buku ini diharapkan banyak membantu dalam analisis sosial ekonomi kesejahteraan penduduk baik untuk kepentingan perencanaan pembangunan maupun untuk kepentingan pelaksanaan pembangunan dengan berbagai intervensinya guna meningkatkan kesejahteraan penduduk di Kabupaten Garut.

1.1 Ruang Lingkup

Kesejahteraan rakyat mengandung makna kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin seluruh rakyat yang berisikan unsur kualitas kehidupan beragama, tingkat pendidikan, kesehatan jasmani dan rohani serta pelayanan sosial dan pemenuhan kebutuhan material masyarakat umumnya. Sedemikian luasnya pengertian kesejahteraan sehingga data statistik ekonomi konvensional seperti pendapatan per kapita masih belum memadai untuk menggambarkan kesejahteraan yang dimaksud.

Pada pengertian yang luas, tidak mungkin untuk menyajikan data statistik secara komprehensif yang mampu mengukur tingkat kesejahteraan penduduk secara paripurna. Indikator yang disajikan pada publikasi ini hanya menyangkut segi-segi kesejahteraan yang dapat diukur (*measurable welfare*), dan statistik sosial merupakan komponen utama dalam penyusunan indikator kesejahteraan rakyat.

1.2 Sistematika

Inkesra Kabupaten Garut Tahun 2024 ini terdiri dari 7 kelompok sektoral yaitu : Kependudukan, Kesehatan, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Taraf dan Pola Konsumsi, Perumahan serta Sosial lainnya yang digambarkan dalam tabel dan gambar/grafik beserta uraiannya yang disajikan secara terpisah dan dalam bab masing-masing.

1.3 Sumber Data

Sumber data Inkesra Kabupaten Garut Tahun 2024 adalah hasil Sensus Penduduk 2020, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2022 dan 2023 serta Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2023. Sumber data tersebut bersifat primer, karena dikumpulkan secara langsung dan diolah oleh BPS.

1.4 Konsep dan Definisi

1.4.1 Rumah tangga dan Anggota Rumah tangga

Rumah tangga dalam hal ini dibedakan menjadi dua, yaitu rumah tangga biasa dan rumah tangga khusus.

- 1) **Rumah tangga biasa** adalah seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya makan bersama satu dapur. Yang dimaksud dengan makan satu dapur adalah jika pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola bersama menjadi satu.
- 2) **Rumah tangga khusus**, yaitu orang-orang yang tinggal di asrama, tangsi, panti asuhan, lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan, dan sekelompok orang yang mondok dengan makan (indekos) dan berjumlah 10 orang atau lebih tidak dicakup dalam Susenas.

Anggota rumah tangga adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga, baik yang berada di rumah pada waktu pencacahan maupun sementara tidak ada. Anggota rumah tangga yang telah bepergian 6 bulan atau lebih, dan anggota rumah tangga yang bepergian kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan pindah/akan meninggalkan rumah 6 bulan atau lebih dianggap bukan sebagai anggota rumah tangga. Orang yang telah tinggal di suatu rumah tangga 6 bulan atau lebih atau yang telah tinggal di suatu rumah tangga kurang dari 6 bulan, tetapi berniat menetap di rumah tangga tersebut dianggap sebagai anggota rumah tangga.

Kepala rumah tangga adalah seorang dari sekelompok anggota yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari rumah tangga tersebut atau orang yang dianggap/ditunjuk sebagai kepala di dalam rumah tangga tersebut.

1.4.2 Pendidikan

Sekolah adalah sekolah formal mulai dari pendidikan dasar, menengah dan tinggi, termasuk pendidikan yang disamakan.

Tidak/belum pernah sekolah adalah mereka yang tidak/belum pernah sekolah, termasuk mereka yang tamat/belum tamat Taman Kanak-kanak yang tidak melanjutkan ke Sekolah Dasar.

Masih bersekolah adalah mereka yang sedang mengikuti pendidikan di pendidikan dasar, menengah atau tinggi.

Tidak sekolah lagi adalah mereka yang pernah mengikuti pendidikan dasar, menengah, atau tinggi, tetapi pada saat pencacahan tidak sekolah lagi.

Jenjang Pendidikan Tertinggi yang pernah/sedang diduduki (ditamatkan) adalah jenjang pendidikan yang pernah diduduki (ditamatkan) oleh seseorang yang sudah tidak sekolah lagi atau sedang diduduki seseorang yang masih sekolah.

Angka Melek Huruf adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi dari seluruh penduduk dari berbagai kelompok umur tertentu (7-12, 13-15, 16-18, dan 19-24) yang masih duduk di bangku sekolah.

Angka Putus Sekolah adalah proporsi anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu.

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi anak sekolah pada satu kelompok umur tertentu yang bersekolah tepat pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya.

1.4.3 Kesehatan

Sakit adalah menderita banyak penyakit menahun (kronis) atau gangguan kesehatan yang menyebabkan aktivitas kerja terganggu. Walaupun

seseorang mempunyai keluhan kesehatan (misalnya masuk angin atau pilek) tetapi bila tidak terganggu kegiatannya sehari-hari maka ia dianggap tidak sakit.

Imunisasi adalah memasukkan kuman penyakit yang sudah dimatikan ke dalam tubuh anak balita dengan cara suntik atau minum dengan maksud agar terjadi kekebalan terhadap jenis penyakit tertentu pada tubuh.

1.4.4 Ketenagakerjaan

Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk yang usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya.

Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.

Penganggur terbuka, terdiri dari:

- a. Mereka yang mencari pekerjaan.
- b. Mereka yang mempersiapkan usaha.
- c. Mereka yang tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.
- d. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

(lihat pada "*An ILO Manual on Concepts and Methods*")

Mencari pekerjaan adalah kegiatan seseorang yang tidak bekerja dan pada saat survei orang tersebut sedang mencari pekerjaan.

Mempersiapkan suatu usaha adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha/pekerjaan yang "**baru**",

yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan/keuntungan atas resiko sendiri, baik dengan atau tanpa mempekerjakan buruh/pekerja dibayar maupun tidak dibayar. Mempersiapkan yang dimaksud adalah apabila "**tindakannya nyata**", seperti: mengumpulkan modal atau perlengkapan/alat, mencari lokasi/tempat, mengurus surat ijin usaha dan sebagainya, telah/sedang dilakukan.

Setengah Penganggur (*underemployment*) adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu). Setengah penganggur terdiri dari :

- **Setengah penganggur terpaksa** adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan.
- **Setengah penganggur sukarela** adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain (sebagian pihak menyebutkan sebagai pekerja paruh waktu/*part time worker*).

Jumlah jam kerja seluruh pekerjaan adalah jumlah jam kerja yang dilakukan seseorang (tidak termasuk jam kerja istirahat resmi dan jam kerja yang digunakan untuk hal-hal di luar pekerjaan) selama seminggu yang lalu.

Status pekerjaan adalah kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan. Mulai tahun 2001 status pekerjaan dibedakan menjadi 7 kategori yaitu: **Berusaha sendiri, Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruhtidak dibayar, Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar, Buruh/Karyawan/Pegawai, Pekerja bebas di pertanian, Pekerja bebas di non pertanian, Pekerja tidak dibayar/pekerja keluarga.**

1.4.5 **Konsumsi Pengeluaran Rumah tangga**

Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan adalah rata-rata biaya yang dikeluarkan rumah tangga sebulan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga

dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Pengeluaran atau konsumsi rumah tangga dibedakan menjadi dua yaitu konsumsi makanan dan bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja, tidak termasuk konsumsi pengeluaran untuk keperluan usaha rumah tangga atau yang diberikan kepada pihak lain. Pengeluaran untuk konsumsi makanan ditanyakan selama seminggu yang lalu, sedangkan pengeluaran untuk bukan makanan setahun yang lalu. Baik konsumsi makanan maupun bukan makanan selanjutnya dikonversikan ke dalam pengeluaran rata-rata sebulan.

1.4.6 Perumahan

Luas lantai adalah luas lantai yang ditempati dan digunakan untuk keperluan sehari-hari. Bagian-bagian yang digunakan bukan untuk keperluan sehari-hari tidak dimasukkan dalam perhitungan luas lantai seperti lumbung padi, kandang ternak, jemuran, dan warung (sebatas atap).

Dinding adalah sisi luar/batas dari suatu bangunan atau penyekat dengan rumah tangga atau bangunan lain.

Atap adalah penutup bagian atas suatu bangunan sehingga orang yang mendiami di bawahnya terlindung dari terik matahari, hujan dan sebagainya. Untuk bangunan bertingkat, atap yang dimaksud adalah bagian teratas dari bangunan tersebut.

<https://parutkab.bps.go.id>

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB II KEPENDUDUKAN

Masalah penduduk yang kian mengemuka belakangan ini berkaitan dengan laju pertumbuhan penduduk. Penduduk memang dapat menjadi modal dasar dalam pembangunan, namun di sisi lain penduduk juga dapat menjadi hambatan dalam mencapai tujuan pembangunan. Hal ini dimungkinkan terjadi apabila pertumbuhan jumlah penduduk tidak terkendali dan tidak diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan penduduk seperti sandang, pangan, papan, dan kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan yang layak.

Selain tingkat pertumbuhan penduduk, masalah komposisi penduduk dan ketimpangan distribusi penduduk juga menjadi masalah serius yang harus segera ditangani oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait masalah kependudukan baik dalam hal kuantitas maupun kualitas penduduk harus terus dilaksanakan dalam upaya memperbaiki kualitas hidup masyarakat sehingga kesejahteraan hidup masyarakat dapat ditingkatkan.

Series data kependudukan yang baik dan otentik sangat diperlukan sekali untuk mengetahui apakah pembangunan yang dilaksanakan secara berkesinambungan dapat semakin dirasakan manfaatnya oleh lapisan masyarakat, terutama pembangunan yang berhubungan langsung dengan pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Pemerintah telah membuat proyeksi penduduk terbaru berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020.

2.1 Laju Pertumbuhan Penduduk

Salah satu masalah klasik kependudukan yang terjadi di Jawa Barat dan terus menjadi perhatian pemerintah adalah jumlah penduduk Jawa Barat yang besar. Dalam hal jumlah penduduk, Jawa Barat adalah provinsi yang menduduki peringkat pertama di Indonesia dengan jumlah penduduk yang paling banyak (hampir 1/5 penduduk Indonesia). Sedangkan untuk Kabupaten Garut sendiri,

jumlah penduduknya menduduki peringkat ke-5 dari 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

Jumlah penduduk Kabupaten Garut pada tahun 2020 berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020 tercatat sebanyak 2,58 juta jiwa. Jumlah penduduk tersebut mengalami kenaikan sekitar 0,16 juta jiwa dari jumlah penduduk pada waktu pelaksanaan Sensus Penduduk tahun 2010 yang sebesar 2,42 juta jiwa.

Dan jumlah penduduk Kabupaten Garut pada tahun 2021 berdasarkan proyeksi tercatat 2,613 juta jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 1,40 %. Laju pertumbuhan yang relatif melambat dari tahun ke tahun, hal ini menggambarkan bahwa program pemerintah yang berkaitan dengan pengendalian penduduk cukup berhasil.

s

Tabel 2. 1 Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Garut, 2021-2023

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Laju Pertumbuhan (%)	Rasio Jenis Kelamin
2021	2.613.529	1,40	105
2022	2.648.952	1,36	105
2023	2.683.665	1,31	105

Sumber : Hasil Proyeksi

Bila dilihat komposisi penduduk menurut jenis kelamin penduduk laki-laki dan perempuan, rasio jenis kelamin penduduk Garut pada tahun 2021 sebesar 104.84. Ini berarti bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan ada sebanyak 104.84 penduduk laki-laki. Dengan kata lain, jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Garut lebih sedikit daripada jumlah penduduk laki-laki. Dari 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, semua Kabupaten/Kota memiliki rasio jenis kelamin di atas 100.



Grafik 2.1 Piramida Penduduk Kabupaten Garut Tahun 2023

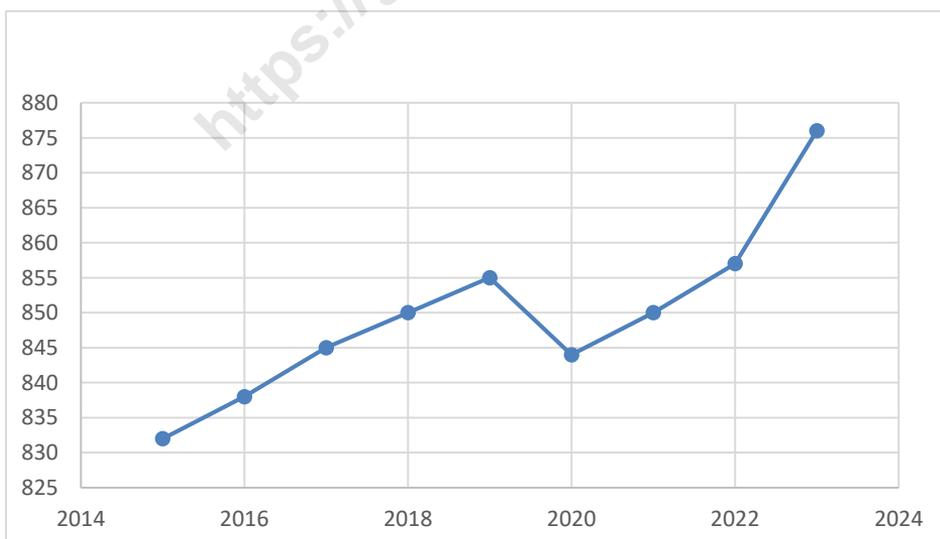
Komposisi penduduk Kabupaten Garut memiliki tipe piramida Ekspansif, yang menggambarkan jumlah penduduk muda lebih besar daripada penduduk usia tua. Jumlah penduduk usia 5-9 tahun, baik laki-laki maupun perempuan lebih rendah dibandingkan dengan kelompok umur 0-4 tahun. Hal ini menunjukkan tingkat pertumbuhan penduduk yang meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Kemudian pada *range* kelompok umur 30 sampai 34 tahun cenderung lebih sedikit. Hal tersebut menggambarkan bahwa migrasi pada kelompok penduduk tersebut cukup tinggi. Bentuk piramida penduduk yang cenderung semakin meruncing ke atas menunjukkan bahwa tingkat mortalitas pada usia

lansia di Kabupaten Garut masih terbilang tinggi. Pola antara kelompok penduduk laki-laki dan perempuan relatif hampir sama.

2.2 Kepadatan Penduduk

Kendati Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Garut akhir-akhir ini tampak relative terkendali, namun secara makro jumlah penduduk terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sementara di sisi lain secara agregat luas wilayah Kabupaten Garut tidak mengalami peningkatan. Hal tersebut secara langsung berdampak pada tingkat kepadatan penduduk (population density) yang secara otomatis terus menerus mengalami peningkatan. Indikator tingkat kepadatan penduduk ini dapat dijadikan suatu gambaran akan kemampuan suatu wilayah dalam memberikan daya dukung berupa sarana atau prasarana dan daya tampung terhadap penduduk.



Grafik 2. 2 Perkembangan Tingkat Kepadatan Penduduk di Kabupaten Garut Periode 2015-2023 (Jiwa/Km²)

Kabupaten Garut yang memiliki luas sekitar 3.065,19 km² dengan jumlah penduduk sebesar 2.683.665 jiwa di tahun 2023, maka tingkat kepadatan penduduk pada tahun tersebut tercatat sebesar 876 orang per km². Sementara jika dibandingkan dengan tahun 2015, dimana jumlah penduduk sebanyak 2.548.723 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 830 orang per km², maka selama kurun waktu delapan tahun telah terjadi peningkatan kepadatan penduduk sekitar 46 orang per km². Perkembangan indikator tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Garut selama periode 2015-2023 dapat dilihat pada Grafik 2.2.

2.3 Angka Beban Ketergantungan

Angka Beban Ketergantungan (*dependency ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase angka beban ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Dampak keberhasilan pembangunan kependudukan juga dapat dilihat pada perubahan komposisi penduduk menurut umur seperti tercermin pada Tabel 2.2 yang angkanya semakin dapat dipertahankan terhadap beban ketergantungan. Hal ini disebabkan dengan semakin bertahan angka beban ketergantungan akan memberikan kesempatan yang semakin besar bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya. Selama periode 2015-2023 angka beban ketergantungan di Kabupaten Garut setiap tahun cenderung mengalami penurunan. Angka beban tanggungan di Garut pada tahun 2022 sebesar 47,356 persen. Artinya, setiap 100 penduduk produktif masih menanggung beban sekitar 47 penduduk tidak produktif (di bawah umur 15 tahun dan 65 tahun ke atas).

Tabel 2. 2 Komposisi Penduduk (%) dan Angka Beban Ketergantungan di Kabupaten Garut, 2015-2023

kelompok umur (Umur)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0-14	31,9	30,86	30,52	30,19	29,97	27,1	27,1	27,04	26,19
15-64	62,63	63,16	63,29	63,39	63,43	67,86	67,86	67,86	68,06
65+	5,47	5,97	6,19	6,42	6,6	5,04	5,04	5,02	5,75
Angka beban ketergantungan	59,67	58,31	57,99	57,75	57,65	47,36	47,35	47,35	47,16

Rasio ketergantungan yang terus cenderung menurun belakangan ini diperkirakan akan mencapai titik terendah pada periode 2020-2030. Pada periode itu terdapat peluang lebih besar untuk melakukan investasi manusia guna mendorong produksi. Namun perlu diketahui bahwa di satu sisi mereka dapat mendorong ekonomi untuk tumbuh jika sebagian besar dari mereka bekerja tetapi disisi lain mereka dapat menciptakan instabilitas sosial dan politik jika diantara mereka banyak yang tidak bekerja. Mereka dikatakan usia produktif tapi tidak dapat termanfaatkan tenaganya karena tidak terserap di pasar kerja.

Pada Tabel 2.2 juga dapat dilihat bahwa struktur umur penduduk Garut masih didominasi oleh penduduk usia produktif yang berdasarkan Hasil Sensus Penduduk tahun 2020 ada sekitar 67,86 . Hal ini menunjukkan bahwa penduduk usia produktif di Garut menjadi sangat potensial sebagai modal dasar yang besar untuk pembangunan. Sementara itu, proporsi penduduk usia lanjut (65 tahun ke atas) ada penambahan dari 5,47 persen pada tahun 2015 menjadi 5,75 persen pada tahun 2023. Bertambahnya angka beban ketergantungan merupakan sedikit permasalahan bagi pemerintah daerah dalam menata program pembangunan.

2.4 Rata-rata Usia Perkawinan Pertama

Salah satu persoalan penduduk yang dapat memicu tingginya penambahan jumlah penduduk yaitu tingginya angka kelahiran di suatu daerah. Banyaknya kelahiran yang terjadi pada seorang wanita dapat dipengaruhi oleh masa reproduksinya. Semakin panjang masa reproduksi seorang wanita,

kemungkinan semakin banyak anak yang dilahirkan. Semakin muda usia seseorang saat melaksanakan perkawinan pertama maka akan semakin panjang masa reproduksinya.

Terdapat beberapa sumber mengenai batasan usia minimal seorang wanita untuk melakukan perkawinan pertama. Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada pasal 7 ayat (1), syarat menikah untuk perempuan harus sudah berusia minimal 16 tahun, sedangkan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak usia minimal untuk menikah yaitu sudah berumur 18 tahun. Sementara itu, menurut Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) usia pernikahan pertama bagi seseorang idealnya adalah 21-25 tahun.

2.5 Penggunaan Alat/Cara KB

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, mengurangi angka kelahiran anak dan kematian ibu. Program KB dilakukan dengan penggunaan alat kontrasepsi/KB yang berbagai jenis/macamnya. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) selaku instansi pemerintah yang menangani program KB ini mengharapkan cakupan akseptor KB terus meningkat. Terutama untuk kepesertaan KB dengan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) seperti IUD dan Implant. Dengan cakupan KB yang meningkat, diharapkan laju pertumbuhan penduduk bisa dikendalikan lebih baik lagi.

Menurut Prof. Dr. Fasli Jalal, perkembangan cakupan ber-KB dapat dikatakan lamban sehingga membuat laju pertumbuhan penduduk (LPP) di Indonesia cukup tinggi. Lambatnya kenaikan angka cakupan ber-KB dipicu oleh beberapa faktor. Utamanya adalah masih tingginya kelompok yang tidak terlayani program KB (*unmet need*) dengan berbagai alasan dan kendala. Selain itu adalah

semakin kecilnya akseptor KB yang memiliki KB dengan metode jangka panjang, sehingga angka *drop out* KB menjadi tinggi.

Berdasarkan hasil Susenas Maret Tahun 2023, persentase wanita berumur 15-49 tahun yang berstatus sedang kawin yang menggunakan alat/cara KB sebesar 64.33 % yang berpendidikan SD kebawah dan 61.77 yang berpendidikan SMP ke atas dan ada yang tidak pernah menggunakan alat /Cara KB yaitu sebesar 21.79 %.

Berdasarkan masa kerjanya, kontrasepsi dibedakan menjadi dua kelompok yaitu sementara (*reversible*) dan permanen. Pilihan kontrasepsi untuk menunda kehamilan pertama dan mengatur jarak kehamilan adalah kontrasepsi yang memiliki masa kerja bersifat sementara, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Seseorang mempunyai pilihan untuk menggunakan jenis alat/cara KB tertentu dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor keamanan, frekuensi pemakaian dan efek samping, terjangkau harganya, cara penggunaan yang dianggap paling praktis, efisien, minim resiko kegagalan dan resiko efek samping terhadap kesehatan pemakai dan memberikan kenyamanan bagi penggunanya.

Tabel 2. 3 Persentase Perbandingan perempuan berumur 15-49 tahun menurut karakteristik dan status penggunaan alat/cara KB Tahun 2022-2023

Alat/Cara KB	2022	2023
Ya, Pernah	10,21	15,35
Ya, Sedang	59,73	62,87
Tidak Pernah	30,06	21,78

Sumber : Susenas Maret

Tabel 2.3 memperlihatkan perbandingan perempuan yang berumur 15-49 tahun pada tahun 2022 dan tahun 2023, penggunaan Alat/Cara KB mengalami penurunan persentase sebanyak 8.28 persen pada yang tidak pernah menggunakan KB artinya menunjukkan adanya peningkatan kesadaran pada masyarakat betapa pentingnya menggunakan Alat/Cara ber KB, dan terbukti ada

peningkatan di tahun 2023 yang sedang menggunakan yaitu sebesar 3.14 % dan yang pernah menggunakan mencapai 5.14 %

<https://garutkab.bps.go.id>

<https://parutkab.bps.go.id>

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB III KESEHATAN

Salah satu indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia suatu wilayah adalah tingkat kesehatan. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka akan semakin mendukung proses dan dinamika pembangunan ekonomi suatu negara/wilayah semakin baik, khususnya dalam meningkatkan tingkat produktivitas. Berkaitan dengan pembangunan kesehatan, pemerintah sudah melakukan berbagai program kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya memberikan kemudahan akses pelayanan publik bidang kesehatan seperti puskesmas yang sasaran utamanya menurunkan tingkat angka kesakitan masyarakat, menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi, menurunkan prevalensi gizi buruk dan gizi kurang serta meningkatkan Angka Harapan Hidup.

Upaya Pemerintah melalui program-program pembangunan yang telah dilakukan diantaranya meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas, merata serta terjangkau, yaitu dengan memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin; menyediakan sumber daya kesehatan yang kompeten dan mendistribusikan tenaga kesehatan secara merata ke seluruh wilayah; meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan melalui pembangunan puskesmas, rumah sakit, polindes dan posyandu serta menyediakan obat-obatan yang terjangkau oleh masyarakat.

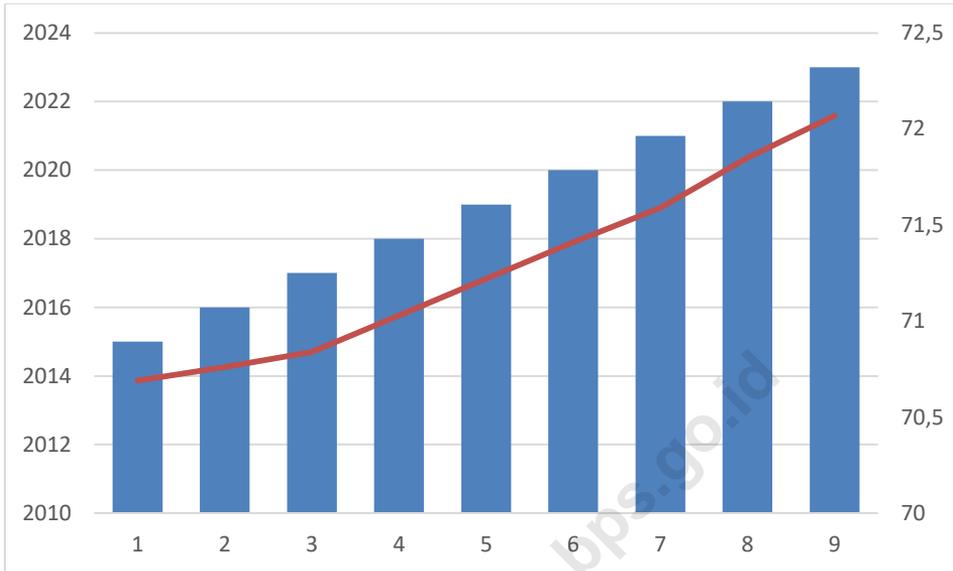
Keberhasilan atas upaya-upaya yang telah dilakukan dalam bidang kesehatan dapat diukur dengan beberapa indikator kesehatan antara lain Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Bayi, Angka Kesakitan, Prevalensi Balita Kurang Gizi, dan indikator lain yang berkaitan dengan akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan seperti persentase balita yang persalinannya ditolong oleh

tenaga medis, persentase penduduk yang berobat jalan ke rumah sakit, dokter/klinik, puskesmas, dan lainnya, serta rasio tenaga kesehatan per penduduk.

3.1 Derajat dan Status Kesehatan

Tingkat kesehatan di suatu wilayah salah satunya dapat dilihat dari besarnya usia harapan hidup penduduknya. Sumber data analisis untuk harapan hidup, semakin membaiknya kondisi kesehatan masyarakat Garut telah diiringi dengan peningkatan Angka harapan hidup, tercatat dari Tahun 2013 angka harapan hidup yang tadinya sampai umur 70,47 tahun menjadi lebih panjang usia mencapai 72,07 tahun pada Tahun 2023. Peningkatan angka harapan hidup ini karena sangat dipengaruhi beberapa faktor, antara lain: semakin baik dan teraksesnya pelayanan kesehatan bagi semua kelompok masyarakat, perilaku hidup sehat oleh masyarakat luas dan disertai semakin baiknya kondisi sosial-ekonomi masyarakat disertai dukungan peningkatan kesehatan lingkungan.

Bila kita bandingkan dengan nilai angka harapan hidup Provinsi Jawa Barat, maka dapat dilihat bahwa angka harapan hidup Kabupaten Garut masih dibawah angka provinsi Jawa Barat. Pada Tahun 2023, angka harapan hidup Provinsi Jawa Barat adalah 73,80 Tahun



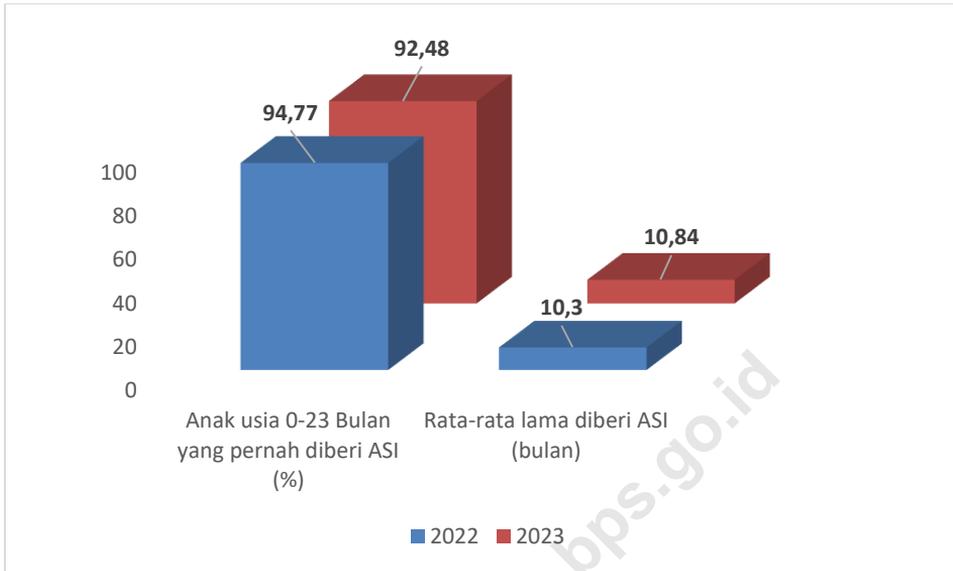
Grafik 3. 1 Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Garut Tahun 2015-2023

Merujuk pada konsep yang diterapkan oleh BPS dalam Susenas, maka Morbiditas (angka kesakitan) menunjukkan adanya gangguan/keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari baik dalam melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga maupun melakukan aktivitas lainnya. Pada umumnya keluhan kesehatan yang mengindikasikan adanya suatu penyakit yang biasa dialami oleh penduduk adalah panas, batuk, pilek, asma/napas sesak, diare, sakit kepala berulang, sakit gigi, campak, dll. Semakin banyak penduduk yang mengalami gangguan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan di wilayah tersebut dan menunjukkan angka kesakitan yang tinggi di wilayah tersebut (penduduknya banyak yang mengalami sakit). Hasil Susenas Maret Tahun 2023 menunjukkan Angka Kesakitan penduduk Garut ada peningkatan persentasi dari tahun 2022 sebesar 3.18 persen dimana untuk tahun 2023 sebesar 15.23 persen sedangkan untuk tahun sebelumnya mencapai 18.41 persen.

Lamanya sakit merupakan salah satu indikator yang memberikan gambaran mengenai kondisi keluhan kesehatan yang dirasakan oleh penduduk suatu wilayah.

3.2 Tingkat Imunitas Balita

Ibu yang sedang mengandung harus mulai memperhatikan asupan yang dimakannya dan juga harus melakukan imunisasi, karena hal tersebut merupakan gizi dan imunisasi awal seorang anak dimulai. Kemudian dilanjutkan setelah sang anak lahir dengan memberikan Air Susu Ibu (ASI) sangat dianjurkan untuk diberikan kepada bayi, karena ASI merupakan makanan pertama bayi yang memiliki peranan penting dalam proses tumbuh kembang anak. ASI memiliki manfaat sangat besar untuk jangka panjang, karena ASI adalah nutrisi terbaik dan terlengkap, mengandung protein dan zat-zat gizi berkualitas tinggi serta mengandung zat antibodi yang berguna untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi, dan melindungi tubuh bayi dari alergi dan diare serta penyakit infeksi lainnya. Oleh sebab itu pemerintah menganjurkan agar seorang ibu dapat memberikan ASI eksklusif kepada bayi sejak dilahirkan sampai 6 bulan ke depan, tanpa menambahkan atau mengganti makanan/minuman lain. Selanjutnya setelah bayi berusia 6 bulan keatas dilanjutkan bersama dengan makanan tambahan dan ASI tetap diberikan hingga usia 2 tahun.



Grafik 3. 2 Persentase Anak Usia 0-23 Bulan yang Pernah Diberi ASI dan Rata-rata Lama Diberi ASI di Kabupaten Garut Keadaan Tahun 2022 dan Tahun 2023

Hasil Susenas Maret 2023 menunjukkan bahwa dari anak usia 0-23 bulan yang pernah diberi ASI di Garut sebanyak 92,48 persen. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi penurunan sebesar 2.29 persen untuk yang pernah diberi ASI, dan untuk lama diberi ASI ada kenaikan sebesar 0.54 persen dari tahun sebelumnya menjadi 10.84 persen. Hal ini menandakan bahwa secara umum, jumlah anak usia 0-23 bulan yang pernah diberi ASI di wilayah Garut terjadi penurunan ,tapi untuk lamanya diberi ASI ada peningkatan.

Imunisasi sangat diperlukan bagi perkembangan dan peningkatan kekebalan daya tahan tubuh balita agar sistem pertahanan tubuhnya kuat terhadap suatu penyakit. Jenis imunisasi ada dua macam yaitu imunisasi pasif yang merupakan kekebalan bawaan pada anak sejak lahir dan imunisasi aktif di mana kekebalan didapat dari pemberian vaksin kepada anak melalui suntik atau tetes. Kementerian Kesehatan menganjurkan agar semua anak-anak dapat memperoleh imunisasi secara lengkap. Anak yang mendapat imunisasi dasar lengkap akan terlindungi dari beberapa penyakit berbahaya dan akan mencegah penularan

kepada orang di sekitarnya. Jenis imunisasi yang wajib diberikan pada balita adalah BCG, DPT, Polio, Campak/Morbili dan Hepatitis B.

Tabel 3. 1 Persentase Anak Umur 0-59 Bulan (Balita) yang Pernah Diimunisasi Menurut Jenis Imunisasi di Kabupaten Garut, Keadaan Tahun 2022 dan Tahun 2023

Imunisasi	2022	2023
BCG	82,47	91,49
DPT	74,55	83,89
POLIO	77,85	86,7
CAMPAK	56,42	60,59
HEPATITIS B	76,7	85,49

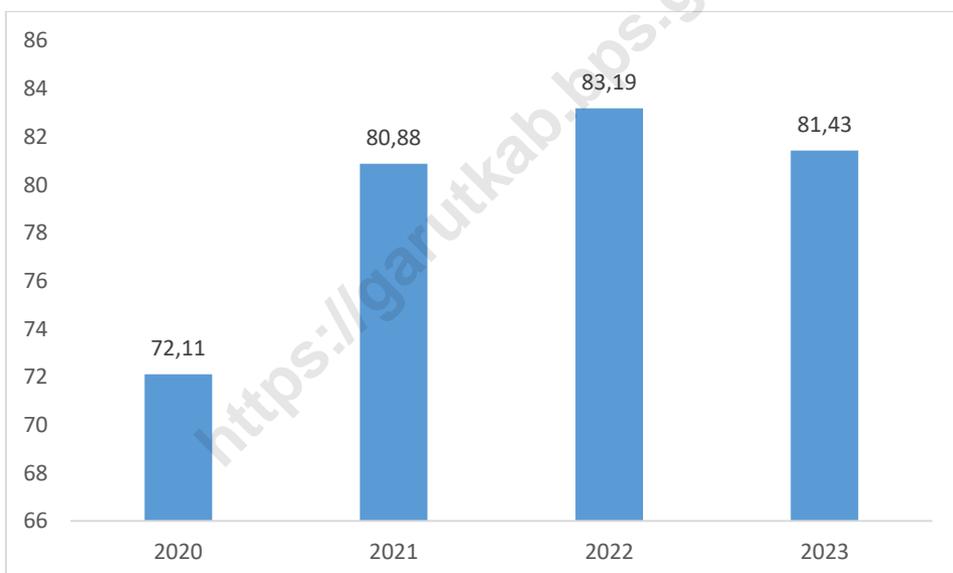
Dalam kurun waktu 2 tahun berdasarkan hasil Susenas Maret 2022 dan 2023, mayoritas anak umur 0-59 bulan (Balita) yang mendapatkan imunisasi wajib secara umum ada peningkatan untuk tiap jenis imunisasinya. Namun, balita yang mendapatkan imunisasi CAMPAK masih di bawah 70 persen tapi ada kenaikan dibanding tahun sebelumnya sekitar 4.17 persen yaitu mencapai 60.59 persen untuk tahun 2023 sedangkan jenis imunisasi lainnya sudah diatas 80 persen.

3.3 Pemanfaatan Tenaga Kesehatan

Untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) salah satunya adalah dengan meningkatkan pertolongan persalinan oleh tenaga medis dan meningkatkan pelayanan neonatal, karena dapat mempengaruhi keselamatan ibu dan bayinya. Penolong persalinan yang ideal adalah tenaga medis karena mereka telah menerapkan proses persalinan yang memenuhi standar kesehatan. Oleh sebab itu, pemerintah selalu berupaya untuk memperluas akses, sarana pelayanan

serta tenaga kesehatan dengan cara meningkatkan jumlah maupun kualitasnya. Seperti meningkatkan pelayanan kebidanan dengan menempatkan bidan di desa-desa, seperti yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan yaitu meningkatkan pengembangan dan pendayagunaan SDM kesehatan yang merata dan bermutu.

Dan terbukti ada peningkatan kesadaran dari masyarakat kabupaten Garut untuk menggunakan tenaga kesehatan dalam pertolongan persalinan sekitar 9,32 % dari tahun 2020 ke tahun 2023 , bisa kita lihat grafik 3.2



Grafik 3. 3 Perbandingan Persentase Penolong Kelahiran Balita di Kabupaten Garut Keadaan Tahun 2020 s/d 2023

Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://garutkab.bps.go.id>

BAB IV PENDIDIKAN

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 28C, ayat 1) dinyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, memperoleh manfaat dari IPTEK, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia. Selanjutnya dalam Pasal 31 ayat 2) dinyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Pendidikan dasar sebagai bagian dari hak asasi manusia dan hak setiap warga negara, maka dalam usaha pemenuhannya harus direncanakan dan dijalankan dengan sebaik mungkin. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang layak dan bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan. Hal tersebut juga menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan bangsa.

Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan diharapkan akan mampu menjadikan warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, UU No 20 tahun 2003 tersebut juga menjelaskan posisi pemerintah dalam dunia pendidikan. Pemerintah berkewajiban “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Pemerintah harus mengusahakan segala yang terkait dengan pendidikan. Baik dari sisi penyelenggaraan, sarana, ketersediaan pengajar. UUD 1945 juga telah mengamanatkan bahwa pemerintah Negara Republik Indonesia (sekaligus Pemerintah Daerah) wajib mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem yang mengatur pendidikan nasional yang mampu menjamin tiap-tiap warganegara memperoleh pemerataan kesempatan dan mutu pendidikan.

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, maka pemerintah pusat dan daerah harus memfasilitasi hak pendidikan bagi tiap warganya. Melalui sekolah yang terjangkau dari sisi pembiayaan, bermutu dari segi layanan dan berkualitas dari sisi pembelajaran. Selain pembiayaan pendidikan yang harus ditanggung pemerintah, sarana dan prasarana, kurikulum, dan sumber belajar dan daya dukung lainnya perlu diupayakan pemerintah.

Mengacu pada pembahasan di atas, hal-hal yang menyangkut dunia pendidikan akan dibahas dalam bab ini. Beberapa indikator yang akan disajikan di dalam publikasi ini, diantaranya Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Indikator-indikator tersebut diolah dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilakukan BPS.

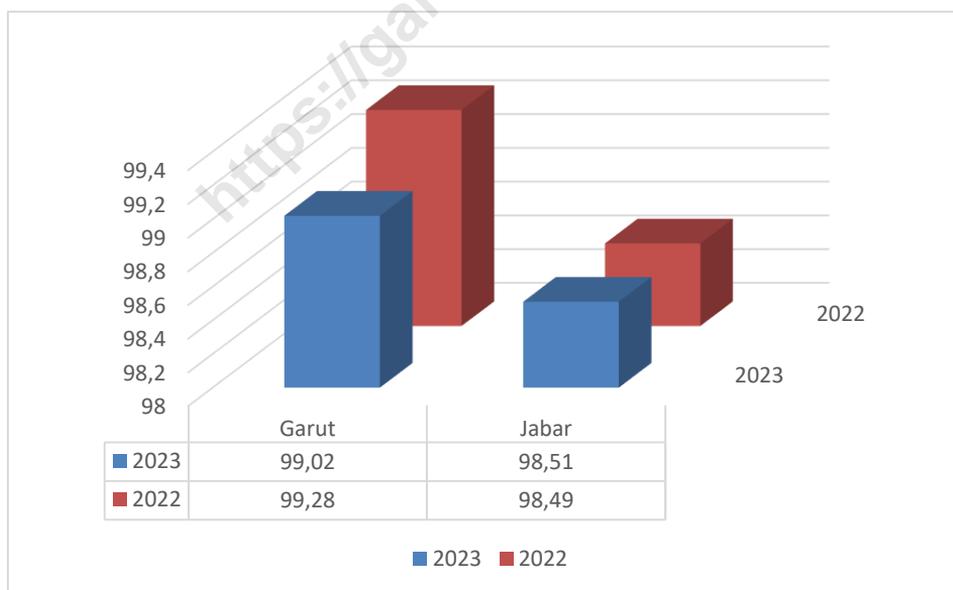
4.1 Angka Melek Huruf (AMH)

Seseorang dikatakan melek huruf apabila orang tersebut dapat menggunakan kemampuan baca dan tulis dengan huruf latin, huruf arab atau huruf lainnya dalam kegiatannya memerlukan kecakapan tersebut dan juga memungkinkannya untuk melanjutkan pemanfaatan kecakapan membaca dan menulis untuk pengembangan diri dan masyarakat. Melek huruf sangat berkaitan erat dengan buta huruf. Semakin meningkatnya angka melek huruf menunjukkan semakin menurunnya angka buta huruf. Baik angka melek huruf maupun angka buta huruf dapat digunakan untuk melihat pencapaian keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf.

Program pemberantasan buta huruf sebetulnya sudah berjalan sejak zaman kemerdekaan, namun dalam perjalanannya terjadi pasang surut, bahkan dalam sejarahnya negara Indonesia pernah memproklamkan bebas buta huruf. Tetapi karena tidak dipergunakan keterampilan menyebabkan banyak yang menjadi buta kembali. Program pemberantasan buta huruf mempunyai tujuan untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis dengan huruf latin dan

berhitung serta berketerampilan. Dengan kemampuan yang dimiliki tersebut memungkinkan seseorang dapat memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, tujuan lain adalah menciptakan tenaga lokal yang potensial guna mengelola sumber daya yang ada di lingkungannya. Bagi pendidikan persekolahan, diharapkan akan mampu menekan angka putus sekolah di pendidikan persekolahan.

Pada tahun 2022, terjadi peningkatan Angka Melek Huruf (AMH) Garut bila dibandingkan dengan Tahun 2020. AMH naik dari 98,68 persen menjadi 99,28 persen. Peningkatan AMH juga menunjukkan bahwa angka buta aksara masyarakat menurun dan semakin meningkatnya kualitas sumber daya manusia dari sisi pendidikan, walaupun minimal hanya dapat membaca dan menulis. Hal ini juga dapat mencerminkan berhasilnya program pemberantasan buta aksara yang telah dilakukan oleh pemerintah.



Grafik 4. 1 Perbandingan Angka Melek Huruf Menurut Penduduk di Kabupaten Garut dengan Provinsi Jawa Barat Keadaan 2022 dan 2023

Walaupun program pemberantasan buta aksara menunjukkan berhasil, program ini harus terus dilakukan karena di Kabupaten Garut masih ada sekitar 0,72 persen penduduknya yang buta huruf/aksara. Angka buta aksara masyarakat harus dapat terus ditekan dan semakin menurun tiap tahunnya. Keberhasilan yang telah dicapai telah menumbuhkan semangat dari pemerintah untuk terus memacu percepatan penurunan angka buta aksara dengan menggalang kerjasama dengan berbagai pihak, seperti dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, organisasi perempuan, organisasi keagamaan, dan swasta. Dengan adanya dukungan dari berbagai elemen masyarakat ini, pemerintah lebih optimis angka buta aksara akan terus mengalami penurunan.

Berdasarkan tabel 4.1 AMH penduduk kabupaten Garut kurun waktu 2 tahun, mengalami penurunan yaitu dari angka 99,28 persen di tahun 2021 menjadi 99,02 persen di tahun 2022.

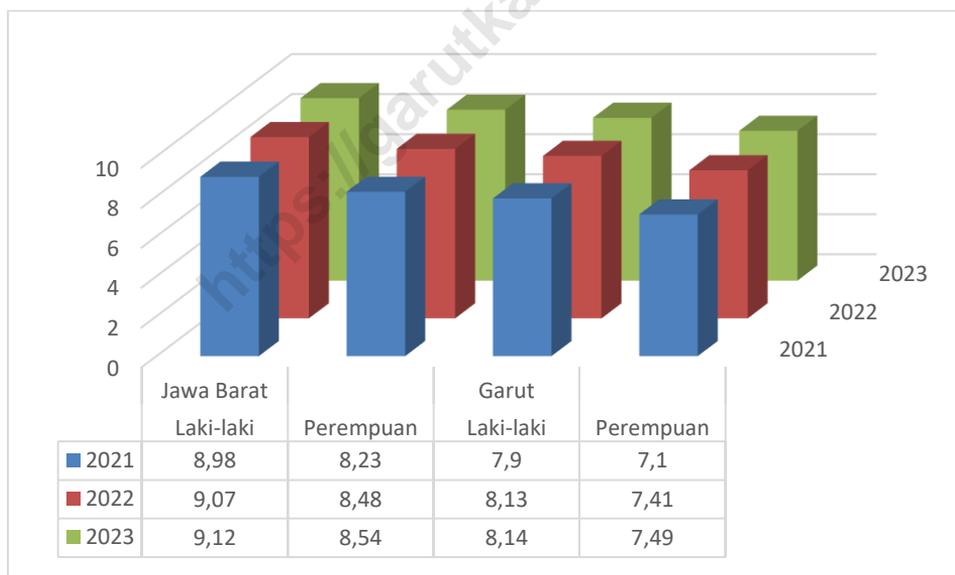
Pencapaian AMH tersebut sudah sangat baik, namun demikian, pemerintah tetap harus terus menggalakkan pemberantasan buta huruf di seluruh wilayah. Lebih khusus lagi, pemerintah harus lebih fokus terhadap usia muda, jangan sampai buta huruf baru di usia muda bermunculan dan akan menjadi beban pemerintah di masa mendatang.

4.2 Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah merupakan indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah itu sendiri mempunyai pengertian jumlah tahun belajar penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Indikator rata-rata lama sekolah sangat penting karena digunakan sebagai salah satu ukuran untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) khususnya di sektor pendidikan.

Untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam sektor pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan menempuh berbagai

upaya dengan meningkatkan waktu rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memperkecil angka putus sekolah dan meningkatkan jumlah angka yang melanjutkan antar jenjang pendidikan. Menurut mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh, cara paling efektif untuk menaikkan waktu rata-rata lama sekolah bukan dengan menyekolahkan kembali penduduk Indonesia yang telah berusia lanjut, tetapi mengupayakan agar tidak ada lagi peserta didik yang putus sekolah. Upaya lain yang dilakukan yaitu dengan meningkatkan akses dan mutu pendidikan anak usia dini (PAUD), meningkatkan partisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar yang bermutu, meningkatkan akses dan mutu pendidikan menengah, meningkatkan akses dan daya saing pendidikan tinggi, serta meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.

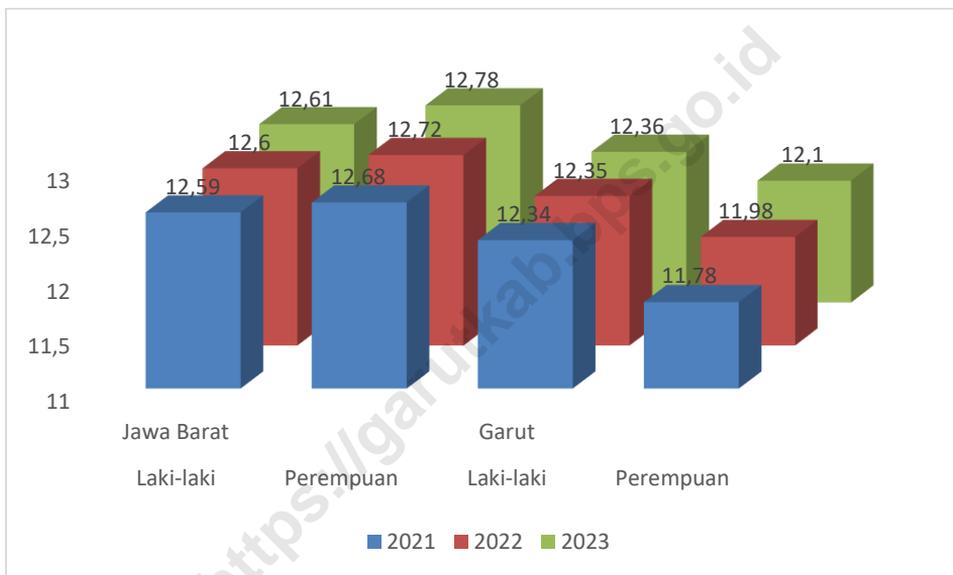


Grafik 4. 2 Angka Rata-Rata Lama Sekolah (MYS) (tahun) di Kabupaten Garut dan Provinsi Jawa Barat, 2021-2023

Secara umum rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di Garut pada tahun 2023 mencapai 8.14 persen untuk laki-laki dan 7,49 persen untuk perempuan, dan tahun 2022 untuk laki-laki mencapai 8.13 persen dan

perempuan mencapai 7.41 persen yang artinya baik laki-laki ataupun perempuan ada kenaikan lama sekolah sampai SMP kelas 2.

Tetapi kalau dibandingkan Provinsi Jawa Barat rata-rata lama sekolah kabupaten garut dari mulai tahun 2022 sampai tahun 2023 masih lebih rendah, artinya angka rata-rata lama sekolah di provinsi Jawa Barat masih lebih baik dari pada angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Garut.



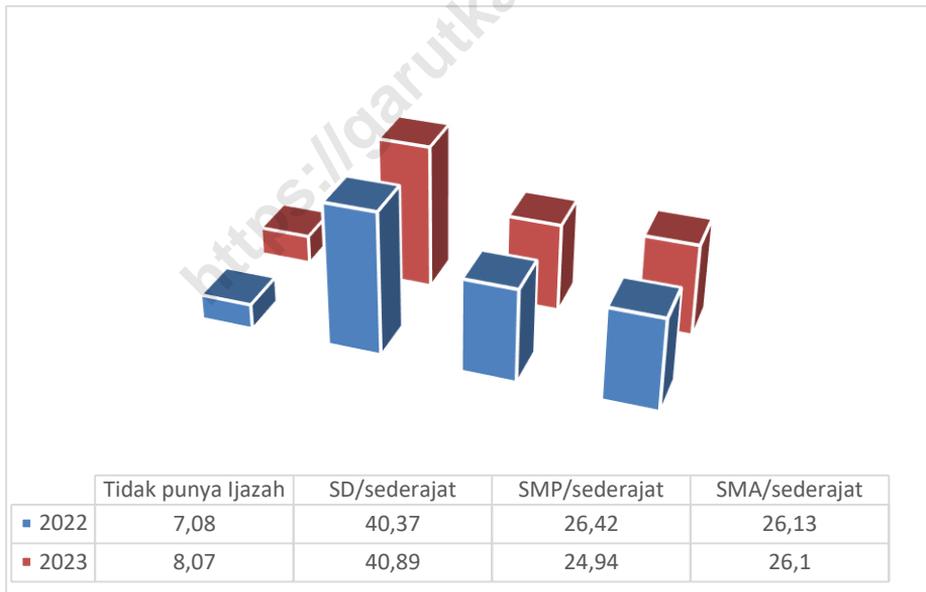
Grafik 4. 3 Angka Harapan Lama Sekolah (EYS) di Kabupaten Garut dan Provinsi Jawa Barat, Keadaan Tahun 2021 – 2023

Angka Harapan Lama Sekolah kalau dibandingkan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 mengalami kenaikan yaitu 0.02 untuk laki-laki Jawa Barat dan 0.1 untuk perempuan Jawa Barat dan 0.02 untuk laki-laki kabupaten Garut dan 0.32 untuk perempuan Kabupaten Garut.

Dan kalau dibandingkan tiap tahun dari tahun 2021 sampai 2023 baik laki-laki maupun perempuan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Garut masih tetap ada dibawah Jawa Barat.

4.3 Tingkat Pendidikan

Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari keahlian/ keterampilan serta ilmu pengetahuan yang dimilikinya yang dapat digambarkan dari tingkat pendidikan yang ditamatkannya. Seseorang yang menamatkan pendidikannya hingga jenjang pendidikannya yang tinggi dapat mempunyai pengetahuan yang luas serta keterampilan/keahlian yang tinggi. Dengan semakin meningkatnya keterampilan/keahlian akan semakin mudah mendapatkan kesempatan untuk bekerja. Indikator tingkat pendidikan yang ditamatkan juga dapat digunakan untuk mengetahui keberhasilan program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah.



Grafik 4. 4 Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah/ STTB Tertinggi yang Dimiliki dan Jenis Kelamin di Kabupaten Garut Keadaan Tahun 2022 dan 2023

Pada tahun 2023, secara umum penduduk usia 15 tahun ke atas yang menamatkan sekolah pada jenjang pendidikan SD dan SMP di Garut mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2022, Penduduk berumur 15 tahun ke

atas yang menamatkan jenjang pendidikan SMP Tahun 2022 mencapai 26,42 persen, sedangkan pada tahun 2023 ada penurunan menjadi mencapai 24,94 persen, Adapun persentase penduduk dengan ijazah yang ditamatkannya pada tingkat SD/MI/SDLB/Paket A mengalami kenaikan yaitu dari 40,37 persen pada Tahun 2022 menjadi 40,89 persen pada tahun 2023.

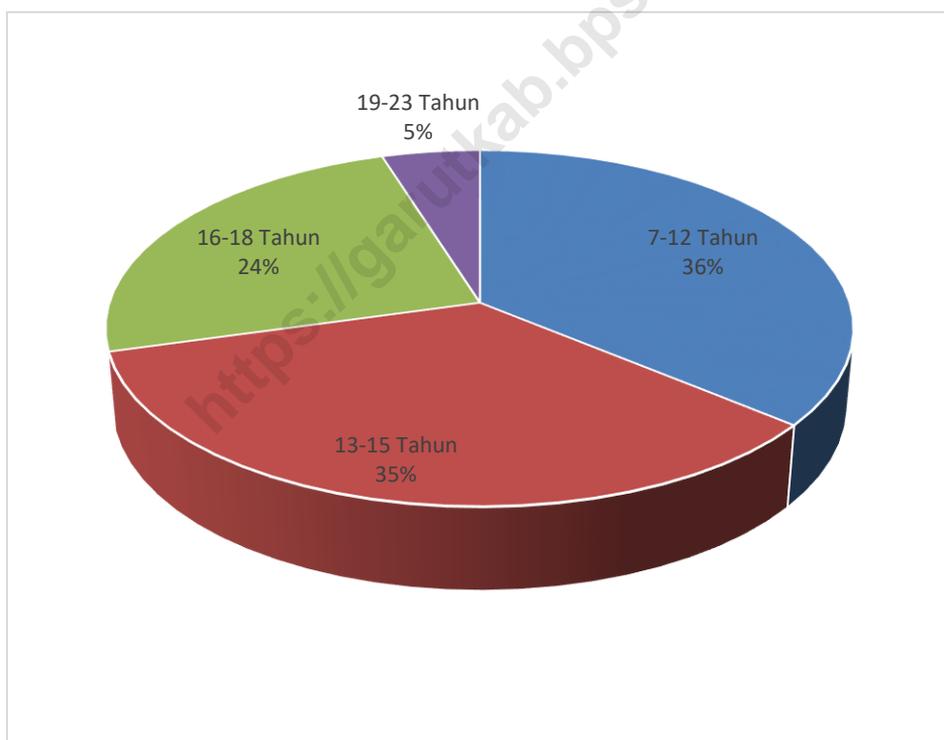
Jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikan yang telah ditamatkan, secara umum persentase penduduk yang tidak mempunyai ijazah pendidikan mengalami kenaikan dari 7,08 persen pada Tahun 2022 menjadi 8,07 persen di tahun 2023. Sementara untuk pendidikan tamatan SLTA ke atas juga sama mengalami penurunan, yaitu sebesar 26,13 persen di tahun 2022, menjadi 26,10 persen di tahun 2023. Hal ini menunjukkan ada kecenderungan telah semakin menurunnya tingkat kesadaran masyarakat bahwa pendidikan itu sangat penting, sehingga masyarakat ada perasaan semakin menuru terhadap berpartisipasi dalam pendidikan, diharapkan kepada pemerintah ini menjadi perhatian yang mendalam untuk meningkatkan kembali tingkat kesadaran masyarakat dalam hal pendidikan supaya lebih perhatian kembali.

4.4 Tingkat Partisipasi Sekolah

Tingkat partisipasi sekolah merupakan salah satu indikator yang dapat mengukur partisipasi masyarakat dalam mengikuti pendidikan dari berbagai jenjang pendidikan dan kelompok umur. Tingkat partisipasi sekolah yang dapat diukur diantaranya yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM). Pemerintah berharap khususnya indikator APS dan APM selalu menunjukkan peningkatan setiap tahunnya pada setiap jenjang pendidikan. Hal ini dapat menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat memperoleh layanan pendidikan dasar dan menengah yang bermutu dan berkesetaraan.

Berdasarkan Susenas tahun 2022, Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk kelompok umur baik itu 13-15 tahun dan 16-18 tahun mengalami

peningkatan. Secara umum APS penduduk berumur 13-15 tahun sebesar 95,29 persen pada tahun 2022 atau mengalami peningkatan dari tahun 2020 yang sebesar 94,46 persen, sedangkan penduduk berumur 16-18 tahun sebesar 67,62 persen atau mengalami kenaikan dari tahun 2020 yang sebesar 61,47 persen. Sementara APS penduduk pada kelompok umur 7-12 tahun mengalami penurunan dari 99,94 persen tahun 2020 menjadi 99,49 persen di tahun 2020. Peningkatan APS pada beberapa kelompok umur dapat menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan semakin meluas dan mudah diakses oleh masyarakat, begitupun sebaliknya.



Grafik 4. 5 Persentasi Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Garut Tahun 2023

Jika dilihat dari perkembangan masyarakat dalam partisipasi sekolah berdasarkan usia antara tahun 2022 dan tahun 2023 kita bisa telaah dan cermati ada kenaikan di kelompok umur 13-23 tahun tapi ada penurunan pada kelompok umur 7-12 tahun, dan terlihat pada kelompok umur 7-12 tahun ada penurunan sekitar 0,35 persen dari tahun 2022 dan untuk kelompok umur yang lainnya semua mengalami kenaikan yaitu untuk kelompok umur 13-15 tahun ada kenaikan sebesar 1,31 persen dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 menjadi 95,77 persen dan begitu pula untuk kelompok umur 16-18 tahun dan 19-23 tahunpun ada kenaikan masing-masing 6,28 persen dan 0,91 persen dimana pada tahun 2022 yang kelompok umur 16-18 tahun tadinya 61,47 persen dan kelompok umur 19-23 tahun 12,51 persen mengalami kenaikan menjadi 67,75 persen untuk kelompok umur 16-18 tahun di tahun 2023 dan 13,42 untuk kelompok 19-23 tahun di tahun 202

BAB V KETENAGAKERJAAN

Permasalahan di bidang ketenagakerjaan merupakan salah satu masalah terbesar yang menjadi perhatian pemerintah. Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang sangat sensitif yang harus diselesaikan dengan berbagai pendekatan agar masalah tersebut tidak meluas yang berdampak pada penurunan kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Tingginya tingkat pengangguran, rendahnya perluasan kesempatan kerja yang terbuka, rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja merupakan sebagian kecil dari berbagai masalah yang dihadapi pemerintah.

Data dan informasi ketenagakerjaan sangat penting bagi penyusunan kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan dalam rangka pembangunan wilayah dan pemecahan masalah ketenagakerjaan. Kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan yang baik dan benar sangat ditentukan oleh kondisi ketersediaan data dan informasi ketenagakerjaan. Selain itu, data dan informasi mengenai ketenagakerjaan juga dapat mencerminkan tingkat pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan.

Bab ini menjelaskan beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi ketenagakerjaan. Sumber data penghitungan indikator ini diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) tahun 2023 kondisi Agustus. Indikator tersebut, antara lain Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), persentase pengangguran menurut tingkat pendidikan, persentase penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan, persentase penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha dan jumlah jam kerja, serta persentase pekerja menurut kelompok upah/ gaji/pendapatan bersih.

5.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator ketenagakerjaan yang penting yang digunakan untuk menganalisa dan mengukur capaian hasil pembangunan. TPAK digunakan untuk mengukur besarnya jumlah angkatan kerja, indikator ini merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja (usia produktif 15 tahun ke atas). Selain TPAK, dalam analisis angkatan kerja juga dikenal indikator yang biasa digunakan untuk mengukur pengangguran yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga, sehingga hanya orang yang termasuk angkatan kerja saja yang merupakan pengangguran terbuka. TPT dapat mencerminkan besarnya jumlah penduduk dalam kategori usia kerja yang termasuk dalam pengangguran.

Penduduk Angkatan Kerja (15 tahun ke atas) di Kabupaten Garut Keadaan Agustus Tahun 2023 sebanyak 1,39 juta orang. Sedangkan jumlah penduduk bukan angkatan kerja mencapai 0,59 juta orang.

Tabel 5. 1 Penduduk Usia Kerja menurut Angkatan Kerja, TPAK, dan TPT Keadaan Agustus Tahun 2021 – 2023

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Agustus 2021	Agustus 2022	Agustus 2023
(1)	(2)	(3)	(4)
	juta orang	juta orang	juta orang
Penduduk Usia Kerja (PUK)	1,91	1,93	1,98
Angkatan Kerja	1,20	1,33	1,39
- Bekerja	1,1	1,23	1,29
- Pengangguran	0,10	0,10	0,10
Bukan Angkatan Kerja	0,71	0,60	0,59
	persen	persen	persen
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	62,76	68,84	70,10
- Laki-Laki	81,15	84,43	85,10
- Perempuan	44,28	53,19	54,39
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	8,68	7,60	7,33
- Laki-laki	9,87	7,46	8,48
- Perempuan	6,50	7,83	5,45

Sumber: Sakernas Agustus

Jika dilihat dari Tabel 5.1 jumlah partisipasi angkatan kerja (TPAK) pada tahun 2023 masih didominasi oleh Laki-laki yang mencapai 85,1 persen dan perempuan yaitu mencapai 54,39 persen dan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) pada tahun 2023 ada peningkatan sekitar 1,26 persen dari tahun 2022, dan pada tahun 2022 juga masih didominasi oleh laki-laki yang mencapai 84,43 persen dan perempuannya hanya 53,19 persen.

Dan untuk tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada tahun 2023 turun 0,27 persen dari tahun 2022 yang mencapai 7,60 persen dan pada tahun 2023 hanya tinggal 7,33 persen.

Tetapi untuk bukan angkatan kerja (sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya) mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dan tercatat pada tahun 2023 yaitu tersisa 0,59 juta orang dari tahun sebelumnya 2022 yang mencapai 0,6 juta orang.

Seperti halnya TPAK, jumlah penduduk usia kerja pada tahun 2021 mencapai 1,91 juta orang dan ada peningkatan pada tahun 2022 yaitu mencapai 1,93 juta orang dan untuk tahun 2023 juga ada peningkatan mencapai 1.98 juta orang dari jumlah tersebut jumlah angkatan kerja yang bekerja juga ada peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sekitar 0,06 juta orang.

<https://garutkab.bps.go.id/>

BAB VI TARAF DAN POLA KONSUMSI

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Selama ini berkembang pengertian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan mengindikasikan rumah tangga tersebut berpenghasilan rendah. Makin tinggi penghasilan rumah tangga, maka makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain rumah tangga/keluarga cenderung semakin sejahtera bila juta orangtase pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil dibandingkan juta orangtase pengeluaran untuk non makanan.

6.1 Pengeluaran Rumah Tangga

Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, cenderung akan semakin tinggi pengeluaran untuk bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bukan makanan atau ditabung. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

Tabel 6. 1 Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita sebulan Menurut Kelompok Komoditas dan Kelompok Pengeluaran di Kabupaten Garut, Pada Tahun 2023

Kelompok Komoditas	Kelompok Pengeluaran (rupiah)			Total
	40 Persen Terbawah	40 Persen Menengah	20 Persen Teratas	Rata-Rata Pengeluaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Padi-padian	75.078	78.724	109.186	83.365
2. Umbi-umbian	4.224	7.729	13.264	7.432
3. Ikan/Udang/ Cumi/Kerang	14.706	30.677	61.611	30.470
4. Daging	17.202	27.244	59.690	29.718
5. Telur dan Susu	17.899	24.897	64.340	29.993
6. Sayur-sayuran	21.529	35.535	67.511	36.324
7. Kacang-kacangan	9.906	14.596	25.408	14.881
8. Buah-buahan	10.014	20.858	51.386	22.626
9. Minyak dan Kelapa	9.853	15.113	27.723	15.530
10. Bahan Minuman	14.133	20.427	38.967	21.617
11. Bumbu-bumbuan	6.445	11.663	24.176	12.077
12. Bahan Makanan Lainnya	9.066	15.108	29.206	15.509
13. Makanan dan Minuman Jadi	94.947	169.257	333.694	172.400
14. Rokok dan Tembakau	50.052	90.745	202.675	96.851
Jumlah Makanan	355.053	562.575	1.108.836	588.794
15. Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga	94.567	185.664	529.549	218.030
16. Aneka Barang dan Jasa	40.294	75.998	310.193	108.604
17. Pakaian. Alas Kaki. dan Tutup Kepala	12.625	27.084	77.902	31.467
18. Barang Tahan Lama	3.633	9.755	165.670	38.541
19. Pajak. Pungutan. dan Asuransi	14.282	22.761	52.721	25.363
20. Keperluan Pesta dan Upacara/Kenduri	2.645	8.418	121.637	28.788
Jumlah Bukan Makanan	168.047	329.680	1.257.672	450.794
Rata-Rata Pengeluaran Kabupaten Garut	523.100	892.255	2.366.508	1.039.588

Sumber : Susenas Maret 2023

Tabel 6.1 di atas menyajikan data pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan dan bukan makanan tahun 2023. Dari tabel tersebut terlihat bahwa selama tahun 2023, pengeluaran masih didominasi oleh kelompok pengeluaran teratas baik kelompok makanan maupun kelompok bukan makanan. Dan kalau melihat secara Total rata-rata pengeluaran untuk makanan masih yang teratas dan sisanya adalah kelompok bukan makanan.

BAB VII PERUMAHAN

Rumah dan kelengkapannya merupakan kebutuhan dasar dan juga merupakan faktor penentu indikator kesejahteraan rakyat. Rumah mempunyai pengaruh terhadap pembinaan watak dalam kepribadian serta merupakan faktor penting terhadap produktivitas kerja dan kreativitas kerja seseorang. Selain itu rumah juga mempunyai fungsi strategis sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang. Dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat melalui pemenuhan kebutuhan papan maka akan terwujud kesejahteraan rakyat.

Rumah juga merupakan sarana pengamanan dan pemberi ketenteraman hidup bagi manusia. Dalam fungsinya sebagai pengamanan diri bukan berarti menutup diri tetapi harus membuka diri menyatu dengan lingkungannya. Kualitas lingkungan rumah tinggal mempengaruhi terhadap status kesehatan penghuninya. Kualitas rumah tinggal yang baik dalam lingkungan sehat, aman, lestari dan berkelanjutan (Kepmen no.9 tahun 1999) diartikan sebagai suatu kondisi rumah yang memenuhi standar minimal dari segi kesehatan, sosial, budaya, ekonomi, dan kualitas teknis.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman sebagai pengganti dari Undang-Undang No. 4 tahun 1992 mencantumkan bahwa salah satu tujuan diselenggarakannya perumahan dan kawasan permukiman yaitu untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Definisi perumahan itu sendiri merupakan kumpulan rumah sebagai bagian dari pemukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan fasilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Rumah selain sebagai tempat tinggal, juga dapat menunjukkan status sosial seseorang. Status sosial seseorang berhubungan positif dengan kualitas/kondisi rumah. Semakin tinggi status sosial seseorang

semakin besar peluang untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal dengan kualitas yang lebih baik.

Salah satu dari sekian banyak fasilitas yang dapat mencerminkan kesejahteraan rumah tangga adalah kualitas material seperti jenis atap, dinding dan lantai terluas yang digunakan, termasuk juga fasilitas penunjang lain yang meliputi luas lantai hunian, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar, dan sumber penerangan. Kualitas perumahan yang baik dan penggunaan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya.

7.1 Fasilitas Rumah Tinggal

Selain kualitasnya, kenyamanan rumah tinggal juga ditentukan oleh kelengkapan fasilitasnya yang sesuai dengan standar kesehatan, Yang termasuk dalam fasilitas tersebut adalah tersedianya air minum dan sanitasi yang layak, serta adanya penerangan yang baik, air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga, ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum dan memasak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah. Sedemikian pentingnya ketersediaan fasilitas ini hingga menjadi salah satu target yang harus dipenuhi dalam tujuan pembangunan milenium (Millenium Development Goals - MDGs). Target tersebut adalah menurunkan hingga separuhnya proporsi penduduk tanpa akses terhadap air minum layak dan sanitasi layak pada 2023.

Berdasarkan kriteria yang digunakan dalam MDGs tersebut, rumah tangga yang memiliki sumber air minum layak adalah rumah tangga yang air minumnya bersumber dari ledeng, air hujan atau dari pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung yang jarak dari tempat pembuangan limbah (tangki septik) terdekat lebih dari 10 m, Dalam hal ini, menggunakan air kemasan maupun isi ulang untuk minum tidak termasuk memiliki sumber air minum yang layak.

Tabel 7. 1 Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan di Kabupaten Garut Tahun 2023

No	Uraian	Persentase
(1)	(2)	(3)
1	Sumber Air Utama Untuk Mandi/Cuci/dll	
	- Air Kemasan Bermerk/Air Isi Ulang	0,26
	- Leding	6,41
	- Sumur Bor/Pompa	18,44
	- Sumur Terlin-dung/ Sumur Tak Terlin-dung	36,42
	- Mata Air Terlindung/ Mata Air Tak Terlindung	34,9
	- Lainnya ¹	3,57
2	Fasilitas Tempat Buang Air Besar	
	- Milik Sendiri	81,87
	- Lainnya ²	18,13
3	Jenis Kloset yang Digunakan	
	- Leher Angsa	87,34
	- Lainnya ³	12,66
4	Tempat Pembuangan Akhir Tinja	
	- Tangki septik/ IPAL	53,22
	- Lainnya ⁴	46,78

Sumber: Susenas Maret 2023 (diolah)

Catatan :

¹Lainnya termasuk air permukaan (sungai/danau/waduk/kolam/irigasi), air hujan, dan lainnya.

²Lainnya termasuk fasilitas bersama rumah tangga tertentu, MCK komunal, MCK umum, tidak menggunakan, atau tidak ada fasilitas tempat buang air besar.

³Lainnya termasuk plengsengan, cemplung/cubluk

⁴Lainnya termasuk kolam/sawah/sungai/danau/laut, lubang tanah, pantai/tanah lapang/kebun atau lainnya.

Pada Tabel 7.1 tampak bahwa masarakat yang menggunakan sumber air utama untuk mandi/cuci/dll yang terbesar pada tahun 2023 adalah dari Sumur/Mata air terlindung mencapai 36,42 persen, bila dilihat lagi dengan lebih mendetil bahwa masyarakat yang mempunyai tempat BAB sendiri mencapai 81,87 persen dengan mayoritas telah menggunakan jenis kloset leher angsa dan tempat pembuangan akhirnya juga mayoritas telah menggunakan tangki septik.

Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://garutkab.bp.go.id>

BAB VIII SOSIAL LAINNYA

Aspek sosial lain seperti akses pada teknologi informasi dan komunikasi juga dapat menjadi indikator yang dapat mengukur kesejahteraan masyarakat, Perkembangan gaya hidup modern memicu kebutuhan akan informasi dan komunikasi yang didapat melalui peralatan komunikasi seperti telepon selular pintar dan komputer, Jenis akses dan media informasi yang beragam tentunya menjadi pilihan bagi masyarakat dalam mengikuti tren gaya hidup modern, Semakin terjangkau harga telepon pintar dan semakin luasnya cakupan wilayah jangkauan frekuensi yang digunakan untuk mengirim dan menerima data internet semakin mempermudah masyarakat dalam mengakses segala informasi yang mereka inginkan,

Peningkatan kesejahteraan masyarakat juga dapat dilihat dari akses terhadap pelayanan publik seperti kredit usaha dan pelayanan kesehatan gratis, serta tingkat keamanan wilayahnya, Semakin besar masyarakat mendapatkan pelayanan kredit usaha semakin mempermudah masyarakat untuk meningkatkan aktivitas usahanya yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan kesehatan gratis menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, terutama masyarakat yang tidak mampu. Dengan pelayanan kesehatan gratis tersebut masyarakat dapat mengalihkan pendapatannya pada keperluan hidup lainnya guna meningkatkan kesejahteraannya.

Rasa aman dan adanya perlindungan dari negara terhadap masyarakat dari gangguan dan ancaman kejahatan diperlukan oleh masyarakat agar dapat beraktivitas dan bekerja. Semakin rendah tingkat kejahatan di suatu wilayah menjadi salah satu indikator peningkatan kesejahteraan sosial di wilayah tersebut.

8.1 Akses Informasi dan Komunikasi

Perkembangan telepon seluler cenderung berdampak kepada kepemilikan rumah tangga atas telepon biasa atau telepon rumah, pesatnya perkembangan teknologi telepon seluler membuat telepon rumah semakin ditinggalkan. Hal ini dapat dilihat dari menurunnya kepemilikan telepon rumah dan meningkatnya kepemilikan telepon seluler, penggunaan telepon rumah yang mengharuskan seseorang berada di posisi tertentu yang terpasang jaringan telepon semakin ditinggalkan masyarakat karena dianggap kurang efisien dalam mendukung mobilitas penggunanya.

Di tahun 2023 penggunaan telepon seluler meningkat dibandingkan Tahun 2020, dari 67,32 persen menjadi 75,69 persen. Kemudian apabila kita lihat berdasarkan jenis kelamin, penduduk laki-laki yang menggunakan telepon seluler selalu lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk perempuan pada setiap tahunnya. Pada Tahun 2020 penduduk laki-laki dibandingkan penduduk perempuan mengalami kenaikan menjadi 76,45 persen di tahun 2023. Penggunaan telepon seluler meningkat karena praktis, dapat dibawa bepergian kemana-mana, lebih bersifat pribadi, dan tersedianya kecanggihan teknologi dalam telepon seluler yang dapat mengakses internet, menyimpan dan mendengarkan musik, menyimpan gambar (foto) dan video, serta merekam gambar dan suara, dan lain-lain.

Gambaran diatas juga terlihat jelas di Tabel 8.1 dibawah ini , dimana untuk akse Internet pada tahun 2020 sampai 2023 terlihat ada kenaikan yang nyata untuk laki-laki dimana dari tahun 2020 yang mencapai 45,28 juta orang menjadi 62,36 juta orang di tahun 2023 dan untuk perempuan juga sama ada kenaikan yaitu pada tahun 2020 pengguna Internet mencapai 42,81 juta orang tetapi pada tahun 2023 menjadi 52,86 juta orang .

Tabel 8. 1 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun Ke Atas yang Mempunyai Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Garut Keadaan Tahun 2023

Karakteristik	Pernah Menggunakan Telepon Seluler (HP)/ Nirkabel atau Komputer (PC/ Desktop, Laptop/ Notebook, Tablet)	Pernah Menggunakan Internet (Termasuk Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Whatsapp, dll)
Laki-laki	76,45	62,36
Perempuan	67,58	52,86
Laki-laki + Perempuan	75,69	61,55

<https://garutkab.bps.go.id/>



DATA

MENCERDASKAN BANGSA

- Enlighten The Nation -



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN GARUT
BPS - STATISTICS OF GARUT REGENCY

Jl. Pembangunan No. 222 Tarogong Kidul Garut 44151,
Jawa Barat, Indonesia Telp. (0262) 233273

Website : <http://garutkab.bps.go.id> Email : bps3205@bps.go.id

ISSN 2830-1323

